

**PENGARUH BELANJA PENDIDIKAN, BELANJA KESEHATAN
DAN BELANJA INFRASTRUKTUR TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2013 – 2022**

Tomi Hartanto¹, Jemmy Idrus^{2*}, Virniasari³

¹Fungsional Analisis Perbendaharaan pada Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Selatan

^{2,3}Pejabat Pengawas pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makale

E-mail: ²⁾ memy.rivai@gmail.com, ³⁾ vhiers.two@gmail.com

Abstract

Quality development does not merely reflect economic growth, but also refers to improving people's welfare as the main goal of development. A key role in achieving this goal is given to human development, which plays a vital role in improving people's welfare. Assessment of the level of community welfare generally uses certain indicators, and one of them is the Human Development Index (HDI). Government intervention in promoting human development is reflected in the allocation of functional expenditure on three main functions, namely health, education and infrastructure. The results show that partially, health spending has a negative but insignificant influence on welfare improvement. Meanwhile, infrastructure spending shows a positive but insignificant effect. On the other hand, education spending has a significant positive effect on improving community welfare. Overall, the three types of expenditure simultaneously had a significant effect on improving the Human Development Index in South Sulawesi Province. The implications of these findings can assist the government and stakeholders in designing more effective policies to accelerate human development and improve community welfare at the regional level.

Keywords: Education Expenditure, Health Expenditure, Infrastructure Expenditure, HDI, Government Expenditure

Abstrak

Pembangunan yang berkualitas bukan sekadar mencerminkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga merujuk pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan. Peran kunci dalam mencapai tujuan ini diberikan kepada pembangunan manusia, yang memainkan peran vital dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penilaian tingkat kesejahteraan masyarakat umumnya menggunakan indikator tertentu, dan salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Intervensi pemerintah dalam menggalakkan pembangunan manusia tercermin dalam alokasi belanja fungsional pada tiga fungsi utama, yaitu belanja fungsi kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, belanja kesehatan memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan. Sementara itu, belanja infrastruktur menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan. Di sisi lain, belanja pendidikan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, ketiga jenis belanja tersebut secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan. Implikasi dari temuan ini dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mempercepat pembangunan manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat regional.

Kata Kunci: Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Infrastruktur, IPM, Belanja Pemerintah

1. PENDAHULUAN

Tujuan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel adalah mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan. Karenanya, setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkannya, maka seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga serta para Gubernur, Bupati dan Wali Kota beserta jajarannya diharapkan bersungguh-sungguh merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi strategi pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada manfaat (Sembiring, 2017).

Dalam mewujudkan pembangunan yang stabil dan berkesinambungan, tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diprioritaskan untuk peningkatan kualitas hidup manusia demi memajukan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut, terdapat beberapa indikator yang umum digunakan, salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM mencerminkan keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan modal manusia berdasarkan tiga aspek pembentuk IPM. Semakin tinggi IPM merepresentasikan pembangunan modal manusia yang semakin baik.

Kedudukan manusia selalu menjadi bagian utama dalam setiap pencapaian program pembangunan. Menurut (Lestari et al., 2019) pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai sasaran akhir dari pembangunan bukan sebagai alat dari pembangunan. Keberhasilan dari pembangunan manusia dapat dilihat dari seberapa besar dapat teratasinya permasalahan - permasalahan mendasar di masyarakat seperti pengangguran, kemiskinan, buta huruf, dan gizi buruk. Untuk menilai tingkat pencapaian dalam pelaksanaan pembangunannya, Indonesia menggunakan IPM yang diukur kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari tiga komponen yaitu pengetahuan, umur panjang dan sehat, dan daya beli. Jika kemajuan yang berarti ditunjukkan oleh ketiga komponen tersebut, maka bisa dikatakan bahwa kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan sejalan dengan perkembangan indeks tersebut (PGSP, 2012).

Berdasarkan aspek pembentuknya, maka intervensi pemerintah dalam memacu pembangunan manusia dapat dilihat dari belanja fungsional pada tiga fungsi, yakni belanja fungsi kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan antara lain digunakan untuk membangun sekolah, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu. Hal ini dapat berimbang terhadap pembangunan manusia jika semakin banyak manusia yang meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka tingkat angka melek huruf masyarakat semakin meningkat dan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Semakin banyak masyarakat mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah maka semakin besar pengetahuan atau skill yang di miliki masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan layak.

Belanja fungsi kesehatan antara lain digunakan untuk membangun rumah sakit/puskesmas, fasilitas kesehatan dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan. Kemudahan akses

tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesehatan dan harapan hidup masyarakat sehingga berpengaruh pada peningkatan angka indeks pembangunan manusia

Angka indeks pembangunan manusia juga dipengaruhi oleh intervensi pemerintah pada sektor belanja infrastruktur yaitu untuk perumahan dan infrastruktur umum. Belanja infrastruktur antara lain digunakan untuk membangun rumah subsidi, sehingga masyarakat dari golongan menengah kebawah dapat memiliki tempat tinggal yang layak kemudian untuk penyediaan saluran air bersih dan sanitasi layak sehingga tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Selain itu juga digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti sarana transportasi, jalan dan lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga pendapatan perkapita masyarakat meningkat. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat akan dapat meningkatnya indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan. Rumusan masalah yang akan dibahas melibatkan pertanyaan mengenai pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia di wilayah tersebut. Secara spesifik, penelitian ini akan mengeksplorasi pengaruh belanja pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, menginvestigasi dampak belanja kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dan menilai kontribusi belanja infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan. Melalui analisis dan pembuktian empiris, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan kompleks antara alokasi anggaran pada sektor-sektor kunci ini dan tingkat kesejahteraan masyarakat di tingkat regional.

2. LANDASAN TEORI

Belanja pendidikan adalah jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota di bidang pendidikan. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang pengalokasian dana pendidikan disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan.

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan sumber daya manusia. Oleh karena itu belanja pendidikan adalah kewajiban secara mutlak harus dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan untuk menyediakan layanan dan fasilitas pendidikan. Tujuan dan manfaat belanja pada fungsi pendidikan telah banyak dikemukakan oleh para peneliti yang meneliti tentang belanja pendidikan. Pada akhirnya akan diungkapkan bahwa belanja pendidikan akan meningkatkan kualitas kesejahteraan manusia.

Belanja pada bidang pendidikan menurut (Dwi Atmanti, 2005) dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena pengeluaran ini merupakan komitmen pemerintah dalam investasi pembangunan sumber daya manusia. Investasi ini lebih lanjut dikenal dengan istilah pembentukan modal manusia (human capital). Human capital menjelaskan bahwa sumber daya manusia menjadi salah satu faktor produksi yang paling penting selain sumber daya alam, modal, entrepreneur untuk menghasilkan output. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka semakin meningkat pula efisiensi dan produktivitas suatu

negara. (Dwi Atmanti, 2005) menjelaskan bahwa sejarah mencatat bahwa negara yang menerapkan paradigma pembangunan berdimensi manusia telah mampu berkembang meskipun tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah.

Belanja kesehatan adalah jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang kesehatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 171 ayat (1) menyebutkan bahwa Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji. Definisi mengenai belanja kesehatan juga dikemukakan oleh (Todaro & Smith, 2003) yang mengatakan bahwa belanja pada sektor anggaran kesehatan adalah pengeluaran pemerintah yang di keluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa pelayanan dan fasilitas kesehatan yang merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat.

Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan menurut (Astri et al., 2013) dapat mempengaruhi pembangunan manusia. Sebab sektor kesehatan tidak bertumpu pada swasta terlebih pasar, melainkan layanan jasa yang normatifnya disediakan oleh pemerintah. Dalam hal peningkatan kesehatan yang baik bagi setiap manusia bisa terwujud melalui alokasi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan. Dengan meningkatnya alokasi pengeluaran pemerintah disektor tersebut maka akan meningkatkan prioduktivitas penduduk sehingga bisa meningkatkan pembangunan manusia. Untuk selanjutnya, pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan dapat disebut sebagai investasi publik.

Infrastruktur menjadi bagian penting dalam peranannya sebagai modal fisik untuk mendukung kelancaran pencapaian tujuan pembangunan, baik di sector pendidikan, kesehatan maupun kegiatan perekonomian. Penciptaan modal manusia (*human capital*) pada sector kesehatan dan pendidikan memerlukan sarana infrastruktur seperti gedung sekolah atau gedung pelatihan pendidikan dan Kesehatan (Sutrisno, 2021). Keberadaan sarana infrastruktur jalan maupun sarana transportasi yang memadai, dapat mendukung kelancaran aktivitas perekonomian. Proses distribusi barang dan jasa dari satu daerah menuju daerah lain dapat terselenggara dengan lancar. Kelancaran ini tentunya akan membuat aktivitas perekonomian menjadi kondusif. (Mourmouras & Lee, 1999) mengungkapkan bahwa peningkatan pengeluaran infrastruktur mempunyai kecenderungan untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, ketiga aspek seperti yang telah disebutkan di atas, yakni pendidikan, kesehatan dan infrastruktur secara bersama-sama mempunyai peranan vital dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan, tidak terkecuali pembangunan modal manusia (Todaro dan Smith, 2003).

Tujuan sekaligus manfaat yang dapat dirasakan dari belanja pemerintah pada sektor perumahan dan fasilitas umum seperti yang dijelaskan oleh Bappenas (2003) adalah ketersediaan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, bandara, sistem penyediaan tenaga listrik, irigasi, sistem penyediaan air bersih, sanitasi, dan sebagainya yang merupakan *social overhead capital*, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan tingkat perkembangan wilayah, yang antara lain dicirikan oleh laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik, mempunyai tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pula, dibandingkan dengan daerah yang mempunyai kelengkapan infrastruktur yang terbatas. Dengan demikian dapat dikatakan

bahwa penyediaan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan nasional.

Dalam Booklet IPM Metode Baru BPS (2014) menjelaskan bahwa IPM merupakan ukuran capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen, yaitu angka harapan hidup yang mengukur pencapaian dalam bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata – rata lamanya bersekolah yang mengukur pencapaian dalam bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata – rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur pencapaian dalam bidang pembangunan untuk hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup yang digunakan oleh semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup (Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik BPS, 2015).

Di dalam PGSP (2012:2), dijelaskan mengenai penggunaan konsep pembangunan manusia. Salah satu sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 adalah percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai sasaran tersebut, dibutuhkan indikator yang dapat mengkaji kemajuan atau progres pembangunan daerah. Salah satu alternatif untuk mengukur kinerja pembangunan suatu Negara atau daerah adalah dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI).

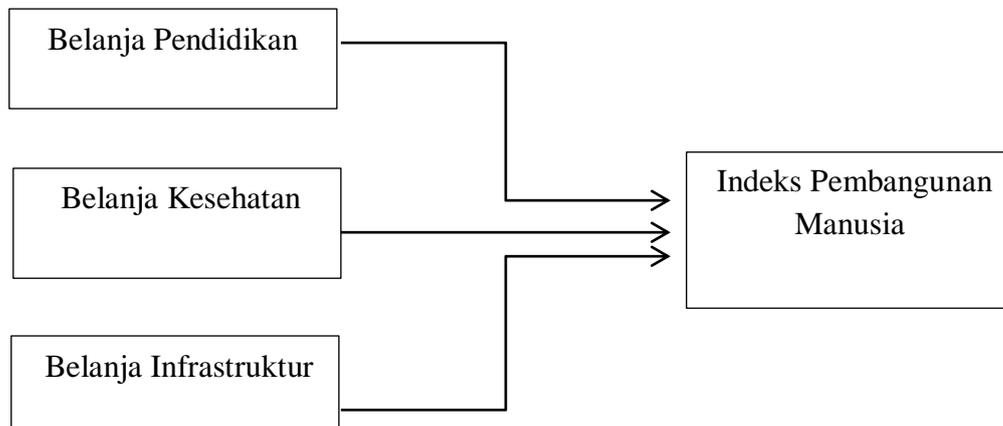
Indeks Pembangunan Manusia didasarkan pada tiga tujuan atau produk akhir pembangunan yaitu masa hidup, pengetahuan, dan standar kehidupan. Konsep IPM menurut UNDP dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengacu pada pengukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, yaitu:

- a. Angka harapan hidup untuk mengukur capaian di bidang kesehatan.
- b. Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah untuk mengukur capaian di bidang pendidikan.
- c. Standar kehidupan yang layak, yang diindikasikan dengan logaritma normal dari produk domestik bruto perkapita penduduk dalam paritas daya beli.
- d. Secara khusus indeks ini merupakan agregasi dari angka melek huruf dan lama sekolah, Angka Harapan Hidup (AHH), serta tingkat konsumsi perkapita. Untuk itu, IPM tidak hanya berguna untuk menetapkan prioritas agenda program pembangunan daerah namun juga sebagai alat ukur dampak pembangunan terhadap kualitas pembangunan manusia. Secara singkat dapat dikatakan bahwa penggunaan konsep pembangunan manusia dimaksudkan untuk mengetahui dan mengidentifikasi seberapa besar kemajuan pembangunan di bidang kesejahteraan manusia (penduduk) dalam berbagai dimensi (PGSP, 2012:2).

2.1. Kerangka Pikir

Dalam penulisan ini, variabel-variabel yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan adalah besarnya belanja pemerintah dalam hal ini belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja infrastruktur yang diyakini berpengaruh

terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk lebih jelasnya hubungan antara variabel-variabel dengan pembangunan manusia, dapat dilihat pada skema berikut:



Gambar 1. Kerangka Penelitian

2.2. Hipotesis Penelitian

H1 = belanja pemerintah pada sektor pendidikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Sulawesi selatan

H2 = belanja pemerintah pada sektor kesehatan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Sulawesi selatan

H3 = belanja pemerintah pada sektor infrastruktur berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan.

Artinya jika belanja pemerintah pada sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor infrastruktur meningkat, maka indeks pembangunan manusia di provinsi Sulawesi selatan juga akan meningkat

2.3. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauhmana pengaruh belanja pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui bagaimana pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, dan Infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun anggaran 2013-2022 (*data time series*).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Jenis penelitian kuantitatif merupakan data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2017). Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017).

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari BPS Provinsi Sulawesi Selatan yaitu data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diakses melalui website resmi <https://sulsel.bps.go.id/> dan data belanja pemerintah dari Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar pengaruh antara Belanja Kesehatan (Variabel independen X1), Belanja Pendidikan (Variabel independen X2) dan Belanja Infrastruktur (Variabel independen X3) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Variabel dependen Y) baik secara simultan ataupun secara parsial. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = c + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_i$$

Keterangan:

Y = Indeks Pembangunan Manusia

c = Konstanta

β_1 - β_2 = koefisien regresi

$\beta_1 X_1$ = Belanja Kesehatan

$\beta_2 X_2$ = Belanja Pendidikan

$\beta_3 X_3$ = Belanja Infrastruktur

e_i = error term

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana dikemukakan pada bagian landasan teori, bahwa beberapa penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan belanja sektoral pemerintah berpengaruh positif terhadap peningkatan IPM.

Tabel 1. Belanja Kesehatan, Belanja Pendidikan, Belanja Infrastruktur dan IPM Tahun 2013 -2022

Tahun	Y	X1	X2	X3
	IPM	Belanja Kesehatan	Belanja Pendidikan	Belanja Infrastruktur
2013	67,92	361,25	3.417,88	1.282,63
2014	68,49	457,82	3.852,36	952,84
2015	69,15	1.052,64	4.648,59	790,29
2016	69,76	1.225,89	4.666,18	708,46
2017	70,34	1.218,01	4.149,48	589,24
2018	70,9	1.374,26	4.368,77	756,05
2019	71,66	1.434,01	4.805,17	606,77

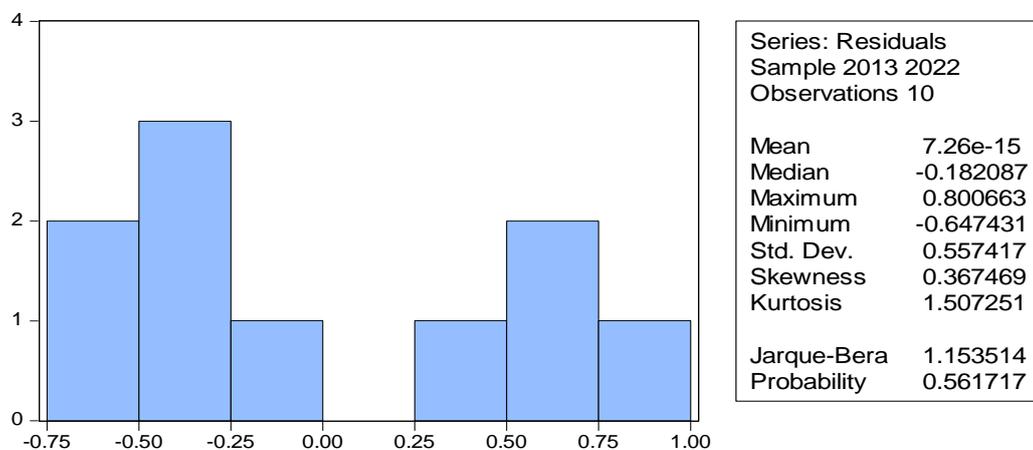
2020	71,93	1.524,50	4.391,21	593,95
2021	72,24	1.256,86	4.182,42	938,91
2022	72,82	1.625,76	4.495,78	674,1

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan dan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan (diolah) (dalam miliar)

Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan software statistik eviews 10, diperoleh output sebagai berikut:



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan uji normalitas dapat diketahui bahwa nilai Signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,561717. Suatu model regresi dapat dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih besar dari $\alpha = 0,05$, maka dapat diketahui bahwa $0,561717 > 0,05$, hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi yang akan diuji memiliki variabel residu yang berdistribusi normal. Dengan demikian dari hasil uji normalitas tersebut menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi klasik normalitas.

2) Uji Autokorelasi

Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan software statistik eviews 10, dengan hasil yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Autokorelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.135339	Prob. F(2,4)	0.8773
Obs*R-squared	0.633808	Prob. Chi-Square(2)	0.7284

Berdasarkan hasil uji autokorelasi dapat diketahui bahwa nilai Signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,7284. Suatu model regresi dapat dikatakan tidak terjadi

autokorelasi jika nilai signifikansi lebih besar dari $\alpha = 0,05$, maka dapat diketahui bahwa $0,7285 > 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari nilai α , berarti dapat diketahui bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi autokorelasi.

3) Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan software statistik eviews 10, diperoleh output sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas
 Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.613753	Prob. F(3,6)	0.6307
Obs*R-squared	2.348168	Prob. Chi-Square(3)	0.5034
Scaled explained SS	0.214400	Prob. Chi-Square(3)	0.9752

Berdasarkan hasil uji Heteroskedastisitas pada model dengan menggunakan Breusch-Pagan-Godfrey menunjukkan bahwa nilai probability chi-square sebesar $0,9752 > 0,05$. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tidak terjadinya masalah Heteroskedastisitas pada model regresi tersebut.

4) Uji Multikoleniaritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikoleniaritas

	X1	X2	X3	Y
X1	1.000000	0.787693	-0.833215	0.897444
X2	0.787693	1.000000	-0.806209	0.549248
X3	-0.833215	-0.806209	1.000000	-0.619888
Y	0.897444	0.549248	-0.619888	1.000000

Dari uji asumsi klasik diatas, data pengamatan (IPM, Belanja Kesehatan, Belanja Pendidikan dan Belanja Infrastruktur) terbebas dari masalah asumsi klasik sehingga model regresi dapat di terima. Persamaan yang terbentuk dari hasil regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = 68,05940 + (-0,001237X1) + 0,005345X2 + 0,002043X3 + e_i$$

Tabel 5. Hasil Uji t

Dependent Variable: Y
 Method: Least Squares
 Date: 06/29/23 Time: 15:59
 Sample: 2013 2022
 Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	68.05940	5.181850	13.13419	0.0000
X1	-0.001237	0.000983	-1.258520	0.2550
X2	0.005345	0.001034	5.168743	0.0021
X3	0.002043	0.002109	0.968671	0.3701
R-squared	0.888359	Mean dependent var	70.52100	
Adjusted R-squared	0.832538	S.D. dependent var	1.668276	
S.E. of regression	0.682694	Akaike info criterion	2.363634	
Sum squared resid	2.796426	Schwarz criterion	2.484668	
Log likelihood	-7.818171	Hannan-Quinn criter.	2.230860	
F-statistic	15.91450	Durbin-Watson stat	2.214913	
Prob(F-statistic)	0.002913			

Jika dilihat melihat hasil Uji t secara parsial atau sebagian dengan ketentuan nilai Prob.< 0,05, maka variable X1 (Belanja Kesehatan) dan variable X3 (Belanja Infrastruktur) tidak berpengaruh secara parsial terhadap perkembangan IPM di Sulawesi Selatan hany variable yang berpengaruh terhadap IPM. Kemudian jika dilihat dari Uji F simulatan atau bersama-sama dengan ketentuan Prob(F-statistic) <0,05, maka ketiga variable yaitu belanja kesehatan, belanja pendidikan dan belanja infrastruktur berpengaruh terhadap IPM di Sulawesi Selatan.

Dari hasil persamaan, konstanta sebesar 68,05940 berarti jika variable X1 (Belanja Kesehatan) variable X2 (Belanja Pendidikan) dan variable X3 (Belanja Infrastruktur) nilainya adalah 0, maka IPM si Sulawesi Selatan berada di angka (Y) 68,05940. Koefisien regresi variabel variable X1 (Belanja Kesehatan) sebesar -0,001237 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan belanja kesehatan mengalami kenaikan Rp1 miliar, maka angka IPM (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,001237 ceteris paribus. Koefisien regresi variable X2 (Belanja Pendidikan) sebesar 0,005345, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan belanja pendidikan mengalami kenaikan Rp1 miliar, maka angka IPM (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,005345 ceteris paribus. Dan variable selanjutnya, Koefisien regresi variable X3 (Belanja Infrastruktur) sebesar 0,002043, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan belanja infrastruktur mengalami kenaikan Rp1 miliar, maka angka IPM (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,002043 ceteris paribus.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh realisasi belanja pemerintah pusat yang dialokasikan di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013-2022. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis atas data penelitian yang telah dilaksanakan, maka diperoleh simpulan bahwa variable belanja pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur secara parsial dari ketiga variable tersebut hanya belanja pendidikan yang berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Di sisi lain menunjukkan bahwa variabel belanja pemerintah pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan infrastruktur berpengaruh signifikan secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk meningkatkan efektivitas belanja pemerintah terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Sulsel yang tercermin pada peningkatan angka IPM, maka terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Belanja kesehatan, belanja pendidikan dan belanja infrastruktur merupakan belanja mandatory, sehingga perlu dikaji lebih lanjut terkait dengan porsi alokasi pada kedua fungsi tersebut. Kemudian opsi selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas belanja kesehatan, belanja pendidikan dan belanja infrastruktur yang berhubungan langsung dengan peningkatan IPM. Kementerian Negara/Lembaga dan Pemda perlu meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah sehingga terjadi keselarasan intervensi fiskal yang berdampak langsung pada peningkatan angka IPM.

DAFTAR PUSTAKA

- Astri, M., Nikensari, S. I., & Kuncara, H. (2013). Pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPED)*, 1(1), 77–102.
- Dwi Atmanti, H. (2005). Investasi sumber daya manusia melalui pendidikan. *Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP)*, 2(Nomor 1), 30–39.
- Ghozali, I. (2011). *Multivariate Analysis Application With SPSS Program*. Diponegoro University Publishing Agency.
- Lestari, P., Sarfiah, S. N., & Prasetyanto, P. K. (2019). Analisis Pengaruh DAU, DAK, dan DBH terhadap IPM di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu Tahun 2012-2016. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 1(1), 100–113.
- Mourmouras, I. A., & Lee, J. E. (1999). Government spending on infrastructure in an endogenous growth model with finite horizons. *Journal of Economics and Business*, 51(5), 395–407.
- PGSP. (2012). *KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR KEP.14/M.PPN/HK/01/2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pelaksanaan Program Provincial Governance Strengthening Programme (PGSP)*.
- Sembiring, L. J. (2017). Sri Mulyani: Setiap Rupiah dalam APBN Ini Amanat Rakyat. *Okezone*. <https://economy.okezone.com/read/2017/09/14/20/1775912/sri-mulyani-setiap-rupiah-dalam-apbn-ini-amanat-rakyat>

-
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sutrisno. (2021). Improvement Of Human Resources Competence With Academic Quality Policy In The Economic Sector Of Higher Education Providers In East Java. *Transformational Language, Literature, and Technology Overview in Learning (TRANSTOOL)*, 1(1), 19–28.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55047/transtool.v1i1.104>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2003). *Economic Development*, eight edition. England: *Pearson Education Limited*.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).